



LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
TAHUN 2020



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG**



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



dinsos@bulelengkab.go.id



(0362) 21248

KATA PENGANTAR

Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan suatu organisasi. Pelaporan Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan, sekaligus merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan laporan pelaksanaan hasil kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tahun empat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2017-2022.

Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2009 belum mencapai hasil maksimal. Dengan demikian Laporan Kinerja menjadi bagian dari sistem pengendalian administrasi pemerintahan, yang diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal, dengan harapan ada perbaikan di masa mendatang.

Singaraja, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, *6*



I Putu Kartaman Putra, S.Sos, MM.

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat berorientasi kepada visi, misi dan tujuan suatu organisasi, dengan memperhitungkan kekuatan, hambatan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin terjadi. Penyelenggaraan program kegiatan di bidang/urusan sosial pada Dinas Sosial sebagaimana ditetapkan Penetapan Kinerja tahun 2020.

Penetapan kinerja memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, target yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat operasional, dengan mengacu pada Renstra 2017-2022 dan Rencana Kerja tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan target yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa 3 sasaran tercapai dengan predikat sangat berhasil. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran di bidang sosial antar lain :

1. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Dinas Sosial Provinsi Bali , Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Polres dan Polsek, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga kesejahteraan sosial lainnya .
2. Tingginya peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Karang Taruna, LKS/Orsos, LK3 dan Dunia Usaha.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui lembaga sosial dalam penanganan masalah sosial, antara lain Panti Asuhan, WKSBM, Forum Komunikasi Panti Asuhan.

Meskipun pencapaian sasaran relatif berhasil, namun demikian masih terdapat permasalahan sosial yang menjadi tantangan, diantaranya adalah :

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih relatif besar dengan permasalahan yang semakin kompleks.
2. Belum adanya keterpaduan data, khususnya dalam penanganan kemiskinan, antara data kemiskinan melalui TNP2K serta Data BDT Tahun 2017 dari Kementerian Sosial RI.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
B. PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
B. REALISASI ANGGARAN	20
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN	
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL TAHUN 2020	
2. CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV	
3. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020	
4. PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2020	

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2016 tanggal, 30 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Sosial mempunyai tugas pokok :

” Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial ” yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang sosial yang berhubungan dengan :

- a. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terdiri atas :

1. Kepala Dinas (Eselon II/b)
2. Sekretaris (Eselon III/a) , dibantu 2 Sub Bagian :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan (Eselon IV/a)
 - b. Sub. Bagian Umum dan Keuangan (Eselon IV/a)
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Eselon III/b), dibantu 3 Seksi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (Eselon IV/a)
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin (Eselon IV/a)
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (Eselon IV/a)
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Eselon III/b), dibantu 3 Seksi :
 - a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia (Eselon IV/a)
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Eselon IV/a)
 - c. Seksi Rehabilitasi Tunas Sosial (Eselon IV/a)
5. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Eselon III/b) 1, dibantu 3 Seksi :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Pasca bencana (Eselon IV/a)
 - b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Eselon IV/a)
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Eselon IV/a)
6. Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Monumen dan Tugu Perjuangan (Eselon IV/a), dibantu:
 - a. Kepala Tata Usaha UPT Monumen dan Tugu Perjuangan (Eselon IV/b)

C. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD :

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial. Sedangkan dari segi teknis, fungsi yang diselenggarakan mencakup: Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Bupati; Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya permasalahan sosial; Pelaksanaan rehabilitasi penyandang permasalahan sosial; Pemberian pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial; Pemberian perijinan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dinas sosial Kabupaten Buleleng, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan baik yang menyangkut pelayanan sosial, pemberdayaan lembaga sosial maupun pembinaan karang taruna serta yang berkaitan dengan penataan dan pelestarian monumen serta penghayatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

Program yang dilaksanakan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta mengurangi timbulnya masalah sosial baru. Program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya penanganan Isu Strategis yaitu penanggulangan kemiskinan, penanggulangan penyandang cacat, penanggulangan keterlantaran, penanganan ketunaan sosial, penanggulangan bencana alam/sosial termasuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.

Program dan kegiatan tersebut akan menjawab terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Buleleng terhadap program-program unggulan nasional sebagaimana dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial maupun pencapaian SDGs dalam penanggulangan kemiskinan .

Kondisi PMKS di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan, namun di beberapa kategori mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena kompleksnya masalah sosial sehingga perlu penanganan yang terpadu. Berbagai kebijakan dan program serta kegiatan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud, seperti meningkatkan kemampuan PMKS, Organisasi Sosial / Panti Sosial dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial telah dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pola penanganan yang dikembangkan tersebut dapat berupa Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Bantuan Perbaikan Gizi (sembako) bagi anak terlantar/anak balita terlantar, lanjut usia

terlantar, keluarga miskin, penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, maupun pembinaan terhadap panti sosial/orsos guna meningkatkan kapasitas maupun kualitas kehidupannya. Sedangkan, untuk penanganan kepada eks para korban diberikan advokasi, bimbingan, motivasi sosial dan keterampilan praktis sesuai dengan potensi keterampilan dasar yang dimiliki serta potensi daerah masing-masing seperti beternak babi/kambing/sapi dan seterusnya .

Terhadap beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami kenaikan seperti bertambahnya kasus Penyandang HIV/AIDS dan bahkan penyebarannya sampai keseluruhan wilayah kecamatan. Hal ini diakibatkan karena kondisi dan perkembangan globalisasi yang disalahgunakan . Namun demikian semua bentuk permasalahan sosial tersebut di atas, telah diupayakan penanganannya secara bertahap , terpadu dan berkesinambungan dengan SKPD/ Lembaga terkait .

Tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup tinggi dengan sebaran yang begitu luas merupakan tantangan dalam upaya penanggulangan/pengentasannya.
- b. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan utamanya peningkatan akibat migrasi dari Luar Bali (Jatim) tidak dapat dipungkiri akan memunculkan kerawanan sosial;
- c. Penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial (Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dll) merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kapasitasnya sehingga mereka bisa berdaya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya;
- d. Rentannya wilayah Buleleng terhadap Bencana Alam dan bahkan setiap tahun sering terjadi di beberapa wilayah kecamatan, hal ini menjadi tantangan dalam upaya penanganan masalah sosial akibat bencana dimaksud.
- e. Belum dimilikinya rumah singgah yang dipergunakan untuk menampung para tuna sosial (WTS, Gepeng , orang terlantar luar daerah dan penyelamatan korban eksploitasi anak dan perempuan) .

- f. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng maka permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan dapat ditanggulangi dalam waktu singkat.

Walaupun masalah sosial tidak dapat di hentikan ataupun di stop karena sifatnya yang dinamis sejalan dengan dinamika kehidupan manusia, namun Dinas Sosial Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah sosial ataupun kerawanan sosial di Kabupaten Buleleng dapat di eliminir sejalan dengan tupoksi yang diembannya dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya.

Adapun peluang dimaksud adalah :

- a. Adanya jalinan koordinasi yang sangat mantap dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah sosial.
- b. Partisipasi lembaga sosial/organisasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial;
- c. Adanya pedoman ataupun kebijakan yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah sosial, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik Dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali maupun APBN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2017-2022, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah menetapkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 .

Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020 telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan sosial yang menjadi Urusan Sosial yang ada di Kabupaten Buleleng.

Adapun Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan menjadi tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu “ Meningkatkan Perlindungan Sosial terhadap masyarakat miskin “ melalui :

1. Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian , keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) :
 - Meningkatnya Efektifitas Pelayanan terhadap PMKS, dengan Indikator Kinerja :
 - a. Peningkatan PMKS yang Mapan, dengan target : 20 PMKS
 - b. Prosentase (%) Penurunan Jumlah PMKS , dengan target : 4.60 %
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial , dengan Sasaran Startegis :
 - Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS, dengan Indikator Kinerja :
 - a. Prosentase (%) Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial. , dengan target : 20 %
3. Meningkatnya nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial , dengan Indikator Kinerja :
 - a. Prosentase (%) Peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. dengan target : 18 %

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS SOSIAL
TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGE T (%)	PROGRAM
1	<i>Sasaran 1</i> Meningkatnya kualitas hidup kemandirian, kebefungsian sosial dan kesejahteraan penyandang masalah	Persentase penurunan keluarga miskin	4.60%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
		Persentase penurunan lanjut usia terlantar	4.60%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		Persentase penurunan anak terlantar	4.60%	Program Pembinaan Anak Terlantar
		Persentase penurunan penyandang disabilitas	4.60%	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma
		Persentase penurunan tuna sosial	4.60%	Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
		Persentase penurunan keluarga miskin	4.60%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		Persentase korban bencana yang puas dalam penanganan bencana sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP)	100%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	<i>Sasaran 2</i> Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan	Persentase Panti Asuhan/Jompo yang berfungsi baik	20%	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
		Persentase kelembagaan sosial yang berpartisipasi aktif dalam penanganan	20%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

	sosial bagi PMKS	PMKS.		
3	<u>Sasaran 3</u> Meningkatnya nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	18%	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020 yang telah ditetapkan dan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
<i>Sasaran 1</i> Meningkatnya kualitas hidup kemandirian, kebefungsian sosial dan kesejahteraan penyandang masalah	Persentase PMKS yang tertangani	4.60 %	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	382.252.200
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	190.329.700
			Program Pembinaan Anak Terlantar	96.064.900
			Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	222.526.000
			Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	114.728.200
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	645.904.000
<i>Sasaran 2</i> Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS	Prosentase (%) peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial.	20%	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	61.348.100
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	96.271.000

<u>Sasaran 3</u> Meningkatnya nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Prosentase (%) nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	18 %	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	932.310.950
---	---	------	--	-------------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Adapun uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	a. Persentase PMKS yang tertangani. b. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social

Berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	a. Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

		2. Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	a. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif
--	--	--	---

Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi :

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100%	: Sangat berhasil
Capaian kinerja >70 sd <85%	: Berhasil
Capaian kinerja >55 sd <70%	: Cukup berhasil
Capaian kinerja < 55 sd 0%	: Tidak berhasil

1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 :

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Tahun 2020 dengan target, realisasi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
1.	Persentase PMKS yang tertangani	4.60	7,31	159%

2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	18	6.84	38.00%
----	--	----	------	--------

Dari uraian tabel tersebut diatas capaian kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2020 dengan skala kriteria diperoleh dengan predikat **sangat baik**. Realisasi dan pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	URAIAN	CAPAIAN IKU
1.	Persentase PMKS yang tertangani	$= \frac{\sum PMKS \text{ yang tertangani}}{\sum PMKS \text{ yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{\sum 3.503}{\sum 47.914} \times 100\%$ $= 7.31 \%$
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$= \frac{\sum PMKS \text{ yang diberikan bantuan}}{\sum PMKS \text{ yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$ $= \frac{3.278}{\sum 47.914} \times 100\%$ $= 6,84 \%$

Realiasi capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2020, dengan target, realisasi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,63	0,23	36.51%

2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80	80	100%
----	--	----	----	------

Dari uraian tabel tersebut diatas capaian kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2020 dengan skala kriteria diperoleh dengan predikat **tidak berhasil**. Realisasi dan pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	URAIAN	CAPAIAN
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	$\frac{\sum \text{PMKS penerima bantuan UEP}}{\sum \text{Jumlah PMKS Tahun sekarang}} \times 100\%$ $\frac{\sum 110}{\sum 47.914} \times 100\%$ $= 0,23\%$
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	$\frac{\sum \text{PSKS yang aktif}}{\sum \text{Jumlah PSKS Tahun sekarang}} \times 100\%$ $\frac{\sum 666}{\sum 831} \times 100\%$ $= 80 \%$

2. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, untuk capaian realisasi tahun 2019 – 2020 sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian 2019	Realisasi Capaian 2020
1.	Persentase PMKS yang tertangani	175 %	159%
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	41.10	38,00%

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja dari tahun 2019-2020, maka rata-rata capaian kinerja dan realisasi kinerja 108.05% sampai 98.50% yaitu dari tahun 2019-2020 sesuai target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja.

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran “Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin meliputi 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 98.50%, dengan predikat **Sangat Berhasil**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin**.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Prosentase PMKS yang tertangani	7,02	4.60	7.31	159%	5.20
2.	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	6.33	18.00	6.84	38.00%	19.30

a. Persentase PMKS yang tertangani

Realisasi pencapaian Prosentase PMKS yang tertangani sebesar 7,31%, diperoleh dari jumlah PMKS yang tertangani (3.502 Orang) dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada (47.914 Orang) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 159%.

b. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Realisasi pencapaian Prosentase PMKS yang diberikan bantuan 6.84%, diperoleh dari jumlah PMKS yang diberikan bantuan (3.278 Orang) dibandingkan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (47.914 orang) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 38.00%.

Sasaran “Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat **Sangat Berhasil**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2020			Target 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	0,63	0,23	36.51%	0,63

a. Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Realisasi pencapaian Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 0,61%, diperoleh dari jumlah PMKS penerima bantuan UEP (110 Orang) dibandingkan dengan jumlah PMKS tahun sekarang (47.914 Orang) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 36.51 %.

Sasaran “Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif meliputi 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat **Sangat Berhasil**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif**.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target 2021
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80	80	80	100%	80

a. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif

Realisasi pencapaian Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif sebesar 80%, diperoleh dari jumlah PSKS yang aktif (666) dibandingkan dengan jumlah PSKS tahun sekarang (831) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 100%.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
5. Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7. Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial
8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
9. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

- a. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Polres dan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga sosial.

- b. Tingginya peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain Tenaga Kersejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tagana, Karang Taruna, LKS, LK3 dan dunia usaha.
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui lembaga sosial dalam penanganan masalah sosial, antara lain Panti Asuhan, WKSBM, Forum Komunikasi Panti Asuhan (Forkapa), Corporate Social Responsibility (CSR) Dunia Usaha, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dharma Bhakti – Buleleng, Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Buleleng dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.
 - d. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Bali, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain :
- a. Belum adanya keterpaduan data, khususnya dalam penanganan kemiskinan, antara data kemiskinan yang diterbitkan BPS dan hasil pendataan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Buleleng.
 - b. Terbatasnya sumberdaya pelaksana kegiatan penanganan PMKS.
- Berkaitan dengan permasalahan tersebut, upaya/ alternative yang dilakukan antara lain :
- a. Koordinasi dan sinkronisasi data PMKS, dalam hal ini data KK miskin terkait dengan Program Perlindungan Sosial dengan TKPK Kabupaten Buleleng dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
 - b. Mengoptimalkan kinerja sumberdaya pelaksana dan meningkatkan kerjasama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta pendamping PKH (Program Keluarga Harapan).

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian Kinerja Organisasi tidak terlepas dari potensi sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, terhadap hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa :

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang ada yang terdiri dari 29 orang tenaga PNS dan dibantu 104 orang tenaga kontrak kerja sebagai tenaga administrasi pada kegiatan dan tenaga cleaning service, tukang kebun, serta sopir. Tenaga tukang kebun dibutuhkan

sebanyak 41 orang bertugas di Monumen/Tugu Perjuangan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial antara lain : Monumen Jagaraga, Taman Makam Pahlawan “Curastana”, Monumen Tri Yudha Sakti, Monumen Ayodya Pura di Selat, Monumen Bhuana Kertha, Tugu Perjuangan Wira Bhuana di Gitgit .

- b. Kurangnya tenaga yang memiliki pendidikan pekerjaan sosial khususnya dalam rangka penanganan masalah sosial yang membutuhkan teori social worker.

6. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja.

Dari 9 Program Wajib dan 22 Kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, pada dasarnya secara keseluruhan telah mendukung terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020. Namun ada kegiatan yang secara kuantitatif belum tercapai realisasi target fisiknya 100% yaitu kegiatan Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa , ini disebabkan karena target penguburan mayat terlantar sebanyak 3 orang namun jumlah kasus mayat terlantar hanya ada 1 orang sehingga terjadi penurunan capaian target fisik untuk kasus - kasus keterlantaran hal ini menandakan bahwa kondisi di Kabupaten Buleleng cukup aman terhadap kasus- kasus keterlantaran.

B. REALISASI ANGGARAN

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
1.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	382.252.200	381.422.110	99,78 %
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	190.329.700	189.507.050	99,56 %
		Program Pembinaan Anak Terlantar	96.064.900	95.678.650	99,59 %
		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	61.348.100	61.249.050	99,83 %
		Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	114.728.200	114.041.150	99,40 %
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	96.271.000	96.200.100	99,92 %

		Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial	932.310.950	929.454.248	99,69 %
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	645.904.000	641.221.070	99,27 %
		Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	222.526.000	221.488.500	99,53 %

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan hasil analisis Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana diuraikan dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja , secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, serta mengarah kepada pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yakni ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”***.

Namun demikian, terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai yang akan diupayakan perbaikannya. Penataan ulang terhadap perancangan program dan kegiatan di tahun mendatang yang mengarah pada penanganan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama.

Menyadari hal tersebut, langkah mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar keluaran program dan hasil kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan ini di masa mendatang.

Lampiran 1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL
TAHUN 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Meningkatnya efektifitas Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%) Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<p>a. Cara Pengukuran: (Jumlah PMKS tahun sebelumnya dikurangi jumlah PMKS tahun sekarang) di bagi jumlah PMKS tahun sebelumnya di kalikan 100%</p> <p>b. Tipe penghitungan : Mandiri per tahun</p> <p>c. Sumber data : Dinas Sosial</p> <p>d. Alasan: Sesuai Dengan</p> <ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor: 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial2. Permensos : 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)

Lampiran 2

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I S/D IV
PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ESELON II																	
A. Kepala Dinas																	
1	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1 Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	0,63	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,00 0,00 0,32 0,31	0,00 0,00 0,32 0,31	- - 100 100			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	382.252.200	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	61.072.200 23.060.000 19.560.000 278.560.000	30.515.960 53.041.150 20.055.660 277.809.340	49,97 230,01 102,53 99,73	
										Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	190.329.700	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	31.399.700 19.810.000 19.560.000 119.560.000	20.733.000 29.951.050 19.560.000 119.263.000	66,03 151,19 100,00 99,75		
										Program pembinaan anak terlantar	96.064.900	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	17.894.900 9.390.000 9.390.000 59.390.000	10.287.000 16.912.650 9.390.000 59.089.000	57,49 180,11 100,00 99,49		
										Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	114.728.200	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25.888.200 14.280.000 14.280.000 60.280.000	15.510.000 24.510.450 14.280.000 59.740.700	59,91 171,64 100,00 99,11		
										Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	645.904.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	232.867.000 77.119.000 74.469.000 261.449.000	99.167.000 198.673.090 79.482.000 263.898.980	42,59 257,62 106,73 100,94		
										Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	222.526.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	49.686.000 14.280.000 14.280.000 144.280.000	17.340.000 46.098.500 14.280.000 143.770.000	34,90 322,82 100,00 99,65		
2	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	1 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	%	80,00	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20 20 20 20	20 20 20 20	100 100 100 100		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.023.350.600	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	312.304.600 223.247.128 212.881.628 274.917.244	240.656.416 239.357.555 221.152.347 316.677.135	77,06 107,22 103,89 115,19		
										Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	197.550.450	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	82.095.000 36.900.000 16.800.000 61.755.450	48.534.235 33.211.340 24.380.060 90.800.840	59,12 90,00 145,12 147,03		
										Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - -	- - - -	- - - -		
										Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52.741.000	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	19.480.300 11.558.300 6.512.400 15.190.000	8.656.366 17.041.980 11.112.740 15.777.242	44,44 147,44 170,64 103,87		
										Program Perencanaan Anggaran SKPD	106.617.900	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	35.249.700 23.368.200 18.000.000 30.000.000	29.412.910 23.746.400 22.110.480 31.060.800	83,44 101,62 122,84 103,54		
										Program Informasi Pembangunan Daerah	-	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - -	- - - -	- - - -		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	61.348.100	Triwulan I	11.678.100	5.190.000	44,44	
												Triwulan II	4.890.000	11.338.250	231,87	
												Triwulan III	4.890.000	4.890.000	100,00	
												Triwulan IV	39.890.000	39.830.800	99,85	
										Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	96.271.000	Triwulan I	30.531.000	18.395.000	60,25	
												Triwulan II	22.080.000	30.045.100	136,07	
												Triwulan III	22.080.000	22.080.000	100,00	
												Triwulan IV	21.580.000	25.680.000	119,00	
										Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial	932.310.950	Triwulan I	277.412.050	255.185.210	91,99	
												Triwulan II	208.192.950	221.686.064	106,48	
												Triwulan III	206.679.650	207.437.302	100,37	
												Triwulan IV	240.026.300	245.145.672	102,13	
TOTAL											4.121.995.000		4.121.995.000	4.103.950.774		

Singaraja, 4 Januari 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 196912311991031053

Lampiran 3
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran 1: Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	a. Prosentase PMKS yang tertangani.	4,60	7,31	159
	b. Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	18	6,84	38,00



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : dinsos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PUTU KARIAMAN PUTRA, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : PUTU AGUS SURADNYANA, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 14 Oktober 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



PUTU AGUS SURADNYANA, ST

I PUTU KARIAMAN PUTRA, S.Sos, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,63%
II.	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	80,00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 382.252.200,00	APBD II
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 190.329.700,00	APBD II
3 Program pembinaan anak terlantar	Rp 96.064.900,00	APBD II
4 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Rp 61.348.100,00	APBD II
5 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rp 114.728.200,00	APBD II
6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 96.271.000,00	APBD II
7 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 645.904.000,00	APBD II
8 Program pembinaan para penyandang Disabilitas dan eks Trauma	Rp 222.526.000,00	APBD II

Singaraja, 14 Oktober 2020

Kepala Dinas Sosial,



I PUTU KARIAMAN PUTRA S.Sos, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199103 1 053

Bupati Buleleng,

PUTU AGUS SURADNYANA, ST.


